

Aktualisasi Distribusi Risiko dan Kelas Sosial Ulrich Beck: Studi Kasus Kabut Asap di Riau

Hanafi Saputra¹, Ahmad Hidayah^{*2}

^{1,2} Studi Humanitas, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas PGRI Sumatera Barat

*e-mail: hanafi.academic25@gmail.com¹ ahmad.akademik@gmail.com²

Abstract

This study aims to analyze the contextualization of Beck's thoughts about the distribution of risk and social class in the case of the haze that hit the people of Riau. Departing from a qualitative case study approach and using risk distribution theory from Ulrich Beck as a tool to analyze research findings, it is known that the effects of industrialization of palm oil in Riau have given birth to haze which carries various risks. The risk from the haze in Riau has an impact on all levels of society regardless of one's class and social status. It's just that, in the process of risk accumulation obtained, there is an imbalance between one class and the other class. For example, a class of people with more privileges (owners of capital, elite groups, landowners, and company owners who don't even live in Riau) will be able to minimize the risks they get by buying masks, conducting self-quarantine, and even mobilizing to other areas. In fact, even if you have to bear the disease, access to health facilities will be able to obtain well, have health insurance, and other facilities that can minimize the risks experienced. Meanwhile, groups without privileges (surrounding communities, oil palm workers, and vulnerable groups) will accept the risk of the existing situation, they can only accept and surrender to the situation at hand. It is in this condition that social class inequality will affect the accumulation of risks acquired by each member of that class.

Keywords: Ulrich Beck; risk distribution; social class; industrialization of palm oil; smog.

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk menganalisis kontekstualisasi pemikiran Beck tentang distribusi resiko dan kelas sosial pada kasus kabut asap yang menimpakan masyarakat Riau. Berangkat dari pendekatan kualitatif studi kasus dan dengan menggunakan teori distribusi risiko dari Ulrich Beck sebagai alat untuk menganalisis temuan penelitian, diketahui bahwa efek dari industrialisasi sawit di Riau telah melahirkan kabut asap yang menyimpan berbagai risiko. Adapun risiko dari kabut asap di Riau tersebut telah berdampak pada seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang kelas dan status sosial seseorang. Hanya saja, dalam proses akumulasi risiko yang didapatkan, terjadi ketimpangan antar kelas satu dengan kelas lainnya. Contohnya, kelas masyarakat dengan privilege lebih (pemilik modal, kelompok elit, pemilik lahan, dan para pemilik perusahaan yang bahkan tidak tinggal di Riau) akan mampu meminimalisir risiko yang diperolehnya dengan cara pembelian masker, melakukan karantina diri, bahkan melakukan mobilisasi ke daerah lain. Bahkan, jika pun harus menanggung penyakit, akses pada fasilitas kesehatan akan mampu diperoleh dengan baik, jaminan kesehatan yang dimiliki, dan fasilitas lain yang dapat meminimalisir risiko yang dialami. Sementara, kelompok dengan tanpa privilege (masyarakat sekitar, pekerja kebun sawit, dan kelompok rentan) mereka akan menerima risiko atas keadaan yang ada, bahkan mereka hanya bisa menerima dan pasrah di atas situasi yang dihadapi. Pada kondisi ini lah ketimpangan kelas sosial akan berpengaruh terhadap akumulasi risiko yang diperoleh oleh masing-masing members kelas tersebut.

Kata kunci: Ulrich Beck, distribusi risiko, kelas sosial, industrialisasi sawit, kabut asap.

1. PENDAHULUAN

Dewasa ini, masyarakat telah mengalami proses perubahan. Diantara perubahan tersebut dapat kita lihat melalui perkembangan teknologi yang berimbang pada perubahan struktur dan tatanan sosial di tengah-tengah masyarakat. Dampak dari perkembangan teknologi ini bisa dilihat juga dari perubahan sistem ekonomi masyarakat. Daniel Bell 1976 mengatakan, telah terjadi perubahan masyarakat yang dibagi ke dalam tiga kelompok diantaranya masyarakat pra-industrial, masyarakat industrial, dan masyarakat pos-industrial. Masyarakat pra-industrial memiliki ciri-ciri diantaranya *extended family, muscle, and against nature*. Pada masyarakat ini bekerja begantung pada alam dan dimana kesuksesan ditandai dengan kemampuan menaklukan alam. Di sisi lain, pada masyarakat industrial memiliki ciri-ciri diantaranya masyarakat yang telah *nuclear family, energy, and against fabricated nature*. Masyarakat industrial dikatakan sukses ketika mereka mampu melakukan produksi

dari alam dengan energi. Sementara itu post-industrial memiliki ciri-ciri masyarakat yang telah mulai individual, *information*, dan *against fabricated nature* serta kesuksesan untuk menggerakan elemen ekonomi menjadi perubahan energi.

Jika ditelaah lebih lanjut, perkembangan masyarakat memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif dari perubahan tersebut bisa kita lihat dari kemudahan yang diperoleh oleh masyarakat sebagai dampak kemunculan teknologi (Bisyafar, 2023; Marianta, 2011). Seperti contoh, kemunculan listrik memberikan dampak yang luarbiasa berupa manfaat bagi masyarakat, sebab listrik dapat menyalakan lampu, dan dengan lampu masyarakat bisa melaksanakan kegiatan di malam hari. Selain itu, kita bisa lihat dari kemunculan mobil, kereta api, dan pesawat terbang dalam bidang transportasi dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan perjalanan dan atau mobilisasi dari satu daerah ke daerah lainnya. Kemunculan mesin uap yang memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk menghasilkan produk dengan mudah, cepat, efisien, dan dalam jumlah yang banyak. Berkat perkembangan teknologi, lahirlah perusahaan-perusahaan industri dengan berbagai macam produk yang dihasilkannya. Pabrik tersebut mulai memproduksi baik barang-barang kategori tersier, sekunder, dan bahkan primer.

Di balik itu semua, perkembangan teknologi tersebut ternyata turut menyumbang dampak negatif (Kusvianti et al., 2023). Diantara dampak negatif tersebut diantaranya, keberadaan listrik membutuhkan sumberdaya energi lain seperti batubara. Hal tersebut terjadi karena listrik dapat dihasilkan melalui pembangkit listrik yang juga membutuhkan dukungan energi lain. Energi itu dapat diproduksi melalui uap yang dihasilkan dari pembakaran batubara. Keberadaan alat transportasi seperti kereta api juga pada awal kemunculannya membutuhkan energi dari pembakaran batubara untuk bergerak, walau pun pada akhirnya kereta api saat ini telah menggunakan energi listrik untuk bergerak, akan tetapi lagi-lagi masih tetap membutuhkan energi listrik agar dapat bergerak.

Bila dilihat lebih jauh, batubara dapat diperoleh dari sumber daya yang disediakan alam. Batubara dapat dihasilkan dengan cara mengambil dari sumber alam yang menyediakan batu bara tersebut. proses pengambilan batubara ini dapat dilakukan melalui proses penambangan yang dilakukan di daerah-daerah penghasil batubara. Logikanya, untuk memenuhi energi listrik, dibutuhkan sumber atau jumlah batu bara yang sebanding. Hal itu mengisyaratkan bahwa semakin besar kebutuhan energi listrik maka jumlah batubara yang diperlukan juga semakin banyak. Dengan kata lain, untuk memenuhi pasokan kebutuhan batubara tersebut, kemudian dibutuhkan lagi teknologi baru. Teknologi itu berfungsi sebagai alat untuk melakukan penambangan dalam jumlah besar agar lebih cepat, efektif dan efisien mengingat batu bara merupakan bahan baku dalam pembangkit listrik tersebut.

Keberadaan tambang yang dilakukan tentu saja memberikan efek yang juga berdampak kepada lingkungan. Penambangan batubara disuatu daerah akan meninggalkan area sisa-sisa penambangannya. Tidak hanya itu, keberadaan tambang juga berdampak kepada pencemaran air bahkan mungkin menyebabkan air keruh dan persediaan air berkurang. Terjadinya gangguan terhadap ekosistem alam, seperti mengganggu flora dan fauna yang awalnya bermukim atau hidup di daerah tersebut.

Kondisi di atas, lebih lanjut turut diperjelas dan dipaparkan oleh Ulrich Beck seorang sosiolog yang telah mencoba untuk keluar dari batasan-batasan ketakutan dalam melihat realitas sosial (Bisyafar, 2023; Hanifah et al., 2023; Kusvianti et al., 2023; Zahro et al., 2023). Beck telah melakukan pengamatan berkaitan dengan kenyataan perkembangan masyarakat dari pra-industrial, industrial, dan post-industrial dimana dalam hal tersebut ternyata terdapat proses distribusi resiko serta adanya kelas sosial berkaitan dengan hal itu. Berangkat dari penjelasan tersebut, penting kiranya kita melihat dan merefleksikan serta meminjam penjelasan Beck mengenai distribusi resiko dan kelas sosial dalam melihat masyarakat Indonesia saat ini, khususnya pada masyarakat Riau dan sekitarnya tentang kasus kebakaran hutan yang terjadi beberapa pekan belakang.

Kemunculan kabut asap akibat terjadinya pembakaran hutan tidak terlepas dari adanya proses industrialisasi yang ditandai dengan munculnya perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Keberadaan perusahaan tersebut mengakibatkan pembukaan lahan-lahan baru untuk dijadikan sebagai perkebunan kelapa sawit, sehingga banyak areal atau wilayah yang awalnya merupakan hutan sebagai sumber penghasil oksigen bagi penghuni bumi, dan juga sebagai habitat alami flora dan fauna dikorbankan, dibuka dan dijadikan sebagai pusat perkebunan kelapa sawit.

Beberapa studi terdahulu membahas mengenai kabut asap telah banyak dilakukan. Studi pertama adalah studi yang dilakukan oleh Meiwanda (2016) yang berjudul "Kapabilitas Pemerintah Daerah Provinsi Riau: Hambatan dan Tantangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan". Berdasarkan studi tersebut diketahui bahwa kapabilitas Pemerintah Provinsi Riau dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan belum berjalan dengan efektif. Hal tersebut dikarenakan pemerintah Provinsi Riau tidak mampu menyiasati dan memberi solusi dari hambatan serta tantangan yang memang sudah bersifat *given* (Meiwanda, 2016). Berbanding terbalik dengan studi yang dilakukan oleh Khairunnisa, et.al (2021) yang berjudul "Koordinasi Pemerintah Kabupaten Kampar dalam Penanggulangan Bencana Kabut Asap". Studi tersebut menyatakan bahwa koordinasi Pemerintah Kabupaten Kampar dalam penanggulangan bencana kabut asap disini dapat dikatakan sudah berjalan cukup baik (Khairunnisa et al., 2021).

Studi selanjutnya dilakukan oleh Nizmi (2021) yang berjudul "Kabut Asap, Ancaman Terhadap Human Security dan ASEAN Way". Studi tersebut menyatakan bahwa pada level regional, ASEAN terus melakukan kerjasama dan memformulasikan kebijakan-kebijakan untuk mengatasi asap. Pada level Pertemuan Tingkat Kementerian telah meriview *Regional Haze Action Plan*, yang menghasilkan formulasi ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution*, sebuah kesepakatan yang mengikat dan diratifikasi oleh semua negara-negara Asia Tenggara (Nizmi, 2021). Studi tersebut serupa dengan hasil studi yang dilakukan oleh Meiwanda & Nizmi (2021) yang berjudul "Kompleksitas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Kabut Asap di Indonesia". Studi tersebut menyatakan bahwa kegagalan mengatasi masalah asap dan mencegah negara lain terkena dampak dapat menjadi langkah penting bagi reformasi kelembagaan bagi Indonesia, dan ASEAN perlu meninjau kembali model keterlibatan anggotanya yang tergolong sangat lunak dalam mengatasi masalah asap lintas batas ini, dan membangun solidaritas antar anggota dalam menangani masalah lingkungan (Meiwanda & Nizmi, 2021).

Masih membahas mengenai kabut asap, studi selanjutnya dilakukan oleh Pasai (2020) yang berjudul "Dampak Kebakaran Hutan dan Penegakan Hukum". Studi tersebut menyatakan bahwa dampak yang dirasakan masyarakat seperti, terjadinya kabut asap yang mengganggu kesehatan manusia, terutama di Provinsi Riau dan Kalimantan. Dampak lainnya adalah mengakibatkan gangguan terhadap penerbangan dari dan ke Provinsi Riau dan Kalimantan. Tidak hanya itu, kebakaran hutan juga telah menyebabkan berbagai kerusakan, terutama terhadap kesehatan masyarakat, khususnya penyakit inpeksi saluran pernafasan atas (ISPA) (Pasai, 2020). Lebih dari itu, Wahyuni (2021) dalam artikelnya yang berjudul "Bencana Kabut Asap sebagai Dampak Budaya Konsumsi dalam Cerpen (Yang Datang dari Negeri Asap)" menyatakan bahwa budaya konsumsi (pada masyarakat, terutama para pengusaha perkebunan) yang menjadi fenomena dalam kehidupan masyarakat berkaitan dengan bencana kabut asap yang terus berulang setiap tahun (Wahyuni, 2021).

Berbagai kegiatan atau aktifitas dilakukan demi terwujudnya perkebunan kelapa sawit untuk mencukupi kebutuhan pasar (Wahyuni, 2021). Hal yang senada dengan prinsip kapitalisme dalam pengembangan kekayaan. Dengan demikian, perluasan untuk pengembangan areal perkebunan dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu cara yang ditempuh untuk mewujudkan hal tersebut yaitu dengan cara membakar hutan-hutan yang memiliki potensi untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit. Hal itu berakibat pada risiko kabut asap yang diproduksi dari kegiatan pembakaran hutan. Asap itu kemudian menyebar dan bahkan berdampak ke daerah yang ada di sekitar daerah kebakaran hutan itu.

Berangkat dari pemaparan di atas, studi ini dilakukan atas dasar mengisi kekosongan gap penelitian terdahulu yang hanya membahas mengenai peran pemerintah dalam penanggulangan bencana kabut asap serta dampak dari bencana kabut asap. Penelitian ini mencoba menganalisis kabut asap di Riau dengan perspektif distribusi risiko dan kelas sosial dari bencana tersebut. Oleh sebab itu, maka muncul pertanyaan bagaimana bentuk kontekstualisasi pemikiran Beck tentang distribusi resiko dan kelas sosial pada kasus kabut asap yang menimpas masyarakat Riau saat ini?

2. METODE

Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif guna mencari realita yang benar-benar terjadi pada objek penelitian dengan menganalisis serta menafsirkan makna-makanan (simbol) yang diberikan oleh masyarakat Riau (Creswell, 2007). Dalam studi ini penulis melakukan kajian literatur

yang berdasarkan kepada pola pikir Beck (Beck, 1992, 1995) dalam melihat proses distribusi resiko dan kelas sosial. Penulis mengambil data-data dan informasi pendukung melalui studi literatur.

Berangkat dari pemikiran Beck, penulis akan melakukan kontekstualisasi dengan salah satu kasus yang sedang terjadi di Indonesia, khususnya pada kasus kebakaran hutan yang terjadi di Riau. Kontekstualisasi ini dilakukan untuk memahami pemikiran Beck yang awalnya di latar belakangi oleh struktur masyarakat di Jerman waktu itu, namun sekarang penulis mencoba mengaitkan dengan latar belakang struktur masyarakat Indonesia.

3. KAJIAN TEORI

Dalam pemikiran Beck, dia menjelaskan bahwa setiap proses perkembangan masyarakat terdapat proses modernisasi. Proses modernisasi itu merupakan salah satu tahapan menuju masyarakat industrial. Hal demikian tercermin dengan adanya proses perkembangan teknologi yang dilihat Beck pada perkembangan masyarakat Jerman waktu itu. Dalam bukunya yang berjudul *Rich Society*, Beck menegaskan bahwa setiap perkembangan modernisasi selalu terjadi proses produksi risiko. Risiko itu merupakan risiko sosial yang dialami oleh masyarakat. Hal tersebut muncul akibat perkembangan teknologi yang kemudian menyumbangkan risiko baik langsung atau pun tidak langsung. Masalah dan konflik terkait dengan distribusi kelangkaan dalam suatu masyarakat bertumpang tindih dengan masalah dan konflik yang muncul dari produksi, definisi, dan distribusi risiko yang diproduksi secara teknis ilmiah (Beck, 1992). Kondisi tersebut mengakibatkan munculnya masyarakat yang oleh Beck dikenal dengan masyarakat risiko.

Terdapat tiga ekologi atau macam risiko yang disebutkan oleh Beck, antara lain: risiko fisik ekologis (*physical ecological risk*), risiko sosial (*social risk*), dan risiko mental (*psyche risk*) (Ritzer, 2003). Dalam kemunculan teknologi yang pada dasarnya bertujuan memberikan manfaat kepada masyarakat, ternyata memiliki dampak berupa risiko yang juga turut muncul beriringan dengan hadirnya teknologi tersebut. Keberadaan alat produksi memicu munculnya pabrik-pabrik industri sebagai penghasil produk tertentu. Kemajuan teknologi menghasilkan penemuan-penemuan baru yang juga turut menyumbang berkembangnya risiko (Beck, 1992). Risiko dalam penjelasan Beck ini diproduksi dari sejumlah penemuan-penemuan oleh ilmuwan yang pada dasarnya merupakan seseorang atau sekelompok orang. Risiko yang dihasilkan oleh sekelompok orang ini memberikan dampak kepada banyak orang, bahkan di luar kelompok itu sendiri. Lebih dari itu, resiko tersebut juga berdampak kepada mereka yang tidak terlibat langsung dengan keberadaan teknologi tersebut (Beck, 1992).

Konsep risiko memiliki hubungan langsung dengan modernisasi. Dalam hal itu, risiko merupakan suatu cara atau tahapan teratur yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan berupa bahaya dan rasa tidak aman yang dihasilkan serta dipopulerkan oleh modernisasi itu sendiri (Beck, 1992). Lebih lanjut, risiko juga merupakan konsekuensi yang berkaitan dengan ancaman kekuatan modernisasi dan berkaitan dengan kecemasan globalisasi. Terdapat lima tesis yang dikemukakan Beck berkaitan dengan distribusi risiko yaitu (Beck, 1992):

1. Risiko yang dihasilkan modernisasi berbeda dengan kemakmuran. Beck memberikan contoh pada radioaktif, toksin, polutan yang terdapat pada air, udara, tanah, dan makanan yang memiliki dampak jangka pendek atau pun jangka panjang kepada manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Risiko tersebut memberikan dampak negatif yang bersifat *irreversible* dan tidak terlihat. Risiko ini dapat dikontrol, sehingga media massa profesi ilmiah, dan hukum yang berwenang memiliki keleluasaan untuk menjelaskan risiko tersebut dan dapat menjadi posisi sosial dan politis yang utama.
2. Sebagian orang lebih terpengaruh pada distribusi dan pertumbuhan posisi risiko sosial yang muncul tanpa prediksi. Dalam beberapa dimensi hal itu diikuti dengan adanya perbedaan kelas dan kedudukan sosial. Risiko-risiko ini cepat atau lambat juga akan menyerang orang-orang yang menciptakan atau mengambil keuntungan darinya. Hal itu dikenal Beck dengan efek boomerang, dimana risiko akan menyebar tidak hanya kepada kelompok tertentu, melainkan akan berdampak kepada masyarakat.
3. Difusi dan komersialisasi risiko tidak terputus sepenuhnya dari logika perkembangan kapitalis, melainkan malah meningkatkan perkembangan kapitalis pada kapitalis tahap baru.

4. Risiko disebabkan oleh peradaban. Pada kondisi ini kelas dan stratifikasi sosial akan mempengaruhi tingkat kesadaran masing-masing individu. Hal tersebut akan mempengaruhi tindakan individu dalam merespon atau menanggapi keberadaan risiko.
5. Risiko yang diakui secara sosial merupakan risiko-risiko yang tampak jelas. Masalah yang muncul akibat dari kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Kondisi yang luar biasa mengancam untuk menjadi normal.

Keberadaan industri yang menghasilkan polusi atas lingkungan dan kerusakan alam, bersama pengaruhnya yang multiragam terhadap kesehatan dan kehidupan sosial manusia. Hal tersebut lebih sering muncul pada masyarakat yang maju. Ciri dari masyarakat ini yaitu terjadinya degradasi pemikiran sosial. Berkaitan dengan keberadaan resiko, Beck juga menjelaskan bahwa terdapat konsep kelas sosial. Semua orang dipengaruhi secara sama di pusat-pusat polusi yang teridentifikasi. Hal itu terlepas dari pendapatan, pendidikan, pekerjaan, dan standarisasi terkait peluang hidup dan rekreasional serta kebiasaan mereka (yang masih harus dibuktikan).

Keberadaan risiko pada masyarakat modern/ industrial didistribusikan kepada masyarakat yang tidak hanya terbatas pada ruang dan waktu atau pada kelompok-kelompok masyarakat tertentu saja (Ritzer, 2003). Melainkan risiko yang didistribusikan dikonsumsi oleh semua kalangan. Hanya saja, perbedaannya terletak pada bagaimana beberapa kelompok masyarakat mampu meminimalisir risiko yang diperolehnya. Meskipun demikian, dengan kemampuan untuk menghindari risiko tersebut, ternyata juga memberikan dampak (menghasilkan risiko) lain.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

INDUSTRIALISASI SAWIT

Bila dilihat ke belakang, munculnya bencana kebakaran hutan tentu memiliki korelasi sebab akibat. Penyebab dari kondisi tersebut tidak terlepas dari perkembangan industrialisasi di Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik Indonesia yang mencatat industri pertanian terutama perkebunan (industri perkebunan kelapa sawit) menduduki posisi pertama penyumbang devisa negara Indonesia. Kelapa sawit juga merupakan komoditi ekspor Indonesia yang sangat penting, bahkan Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia (BPS, 2018).

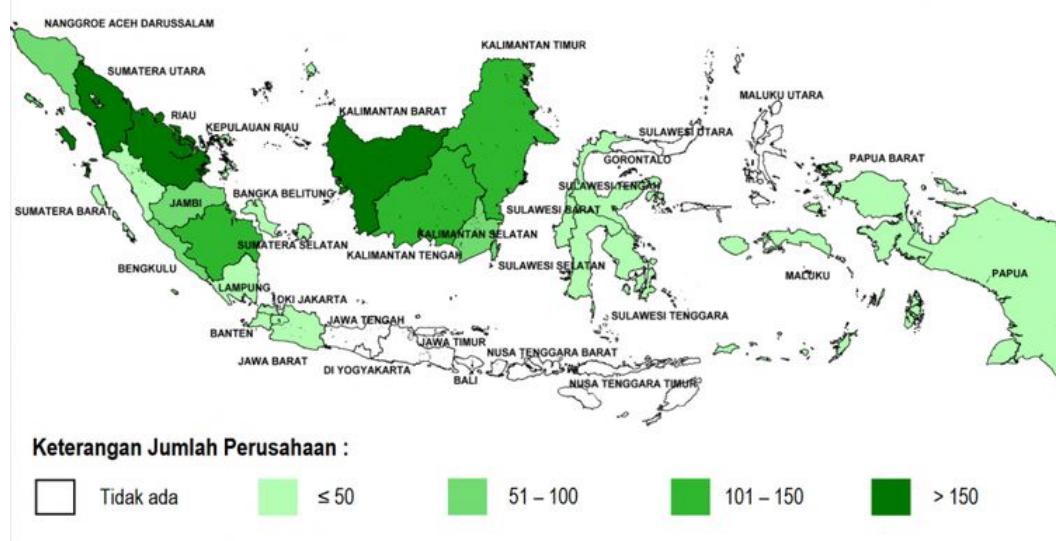
Di Indonesia sendiri, terdapat lima provinsi yang menjadi produsen kelapa sawit terbesar, yaitu Riau, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Timur. Kontribusi terbesar yang tercatat dari data BPS tahun 2017 Riau menjadi produsen dengan total produksi 22,40%, Kalimantan Tengah 15,12%, Sumatera Utara 12,02%, Sumatera Selatan 8,98% dan Kalimantan Timur 7,53%. Selain itu, jika kita lihat dari luas lahan sawit yang ada di Indonesia pada tahun 2015 (gambar peta luas lahan sawit terbaru hanya dapat penulis temukan untuk tahun 2015) maka dapat dilihat dari peta berikut:



Gambar 1. Peta Persebaran Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia Berdasarkan Luas Areal Perkembangan Kelapa Sawit

Dari peta di atas terlihat bahwa provinsi Riau, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Utara masuk kepada tiga provinsi dengan luas lahan sawit lebih dari 1.000.000 hektar. Dari kenyataan itu, hal yang masuk akal jika pemerintah memiliki keinginan untuk lebih mengembangkan produksi Indonesia di bidang perkebunan terutama perkebunan kelapa sawit. Apalagi prospek industri kelapa sawit kini semakin menjanjikan baik di pasar dalam negeri atau pun di pasar dunia. Sektor perkebun kelapa sawit tersebut akan semakin strategis karena berpeluang besar untuk lebih memainkan peran menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional (Kemenperin, 2019).

Di dalam negeri, kebijakan pemerintah mengembangkan bahan bakar nabati (BBN) sebagai alternatif bahan bakar minyak (BBM). Hal itu tentu juga memberikan peluang besar bagi industri perkebunan kelapa sawit untuk lebih berkembang. Mendukung hal itu maka diperlukan tambahan pasokan atau peningkatan produksi kelapa sawit dalam jumlah besar, sehingga menarik banyak investor yang berkeinginan untuk ikut serta berinvestasi dalam pengembangan dan berinvestasi di bidang perkebunan kelapa sawit tersebut. Berdasarkan hal itu, kita dapat melihat persebaran dari jumlah perusahaan kelapa sawit yang ada di Indonesia melalui peta berikut:



Gambar 2. Peta Persebaran Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia Berdasarkan Jumlah Perusahaan

Provinsi Riau lagi-lagi masuk ke dalam provinsi dengan jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia. Terdapat lebih dari 150 perusahaan yang ada di Riau. Sementara, berkaitan dengan kepemilikan perusahaannya, tercatat bahwa perusahaan yang dikelola swasta menduduki kedudukan pertama, sedangkan perusahaan yang dikelola negara menduduki posisi terendah. Hal tersebut dapat dilihat dari data 57,70% perusahaan perkebunan swasta, 36,90% perkebunan rakyat, dan 5,40% perusahaan perkebunan negara (BPS, 2018).

Keberadaan industri kelapa sawit memberikan keuntungan terutama dalam kontribusi penyumbang devisa bagi negara. Di sisi lain, keberadaan industri kelapa sawit memberikan sumbangan risiko. Dikatakan demikian karena industri yang hadir tentu memiliki motivasi untuk pengembangan lahan perkebunan mereka. Tujuannya yaitu untuk memperoleh penghasilan dan keuntungan yang berlipat ganda.

Keberadaan kelompok perusahaan perkebunan swasta, perkebunan rakyat, dan perkebunan negara termasuk ke dalam kategori kelas sosial. Hal itu didasari karena mereka merupakan orang/kelompok yang menguasai lahan perkebunan dan memiliki pengaruh, kekuatan, bahkan memiliki otoritas dalam pertimbangan serta *lobbying* pengambilan keputusan. Mereka yang menguasai lebih banyak lahan tentu akan mampu memberikan tekanan dan memberikan *pressure* terhadap pengambil

kebijakan. Hal tersebut berlandaskan kepada kepentingan pemilik lahan, dalam hal ini perusahaan perkebunan kelapa sawit.

INDUSTRIALISASI SAWIT, KABUT ASAP DAN DISTRIBUSI RISIKO

Meminjam pemikiran Beck, maka kemunculan perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut merupakan bentuk dari lahirnya masyarakat industrial. Kemunculan industri tersebut akan memberikan banyak dampak. Tidak hanya dampak positif namun juga dampak negatif berupa lahirnya risiko-risiko yang menyertai munculnya perusahaan industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia terutama di Riau.

Kemunculan industri tersebut tentu juga berakibat pada banyaknya lahir perusahaan perkebunan swasta yang menanamkan investasi di Riau. Mereka akan berlomba-lomba melakukan produksi yang lebih banyak dan melakukan perluasan lahan perkebunnya. Perluasan lahan dapat dilakukan melalui pembukaan lahan baru. Sebagai perusahaan dengan perhitungan ekonomi, tentu hal yang masuk akal dimana perusahaan berusaha memproduksi produk dengan sebesar-besarnya namun dengan modal yang sekecil-kecilnya. Pembukaan lahan dengan cara dibakar menjadi alternatif untuk mewujudkan hal tersebut.

Tercatat pada tahun 2019 berdasarkan Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Senin (16/9/2019) pukul 16.00 WIB, ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 513, Kalimantan Barat 384, Kalimantan Selatan 178, Sumatera Selatan 115, Jambi 62, dan Riau 58 titik panas. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas kebakaran hutan di Indonesia tahun 2019 ini mencapai 328.722 hektar. Di Riau 49.266 hektar, Kalimantan Tengah tercatat seluas 44.769 hektar, Kalimantan Barat 25.900 hektar, Kalimantan Selatan 19.490 hektar, Sumatera Selatan 11.826 hektar, dan Jambi 11.022 hektar. Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun Riau ditemukan 58 titik panas, dimana itu merupakan jumlah titik panas paling rendah, namun luas dampak yang dihasilkan dari kebakaran itu. Riau merupakan daerah dampak terluas dengan luas 49.266 hektar.

Dampak dari kebakaran hutan tentu memiliki risiko yang sangat besar. Risiko yang dihasilkan dari kebakaran ini berdampak tidak hanya kepada manusia, tetapi juga berdampak kepada flora dan fauna yang ada. Hewan dan tumbuhan langka yang seharusnya dilindungi dan dijaga keberlangsungan hidupnya malah mati tak berdaya akibat kebakaran hutan. Padahal kita mengetahui, keberadaan hutan sendiri sangat penting bagi flora dan fauna. Hutan merupakan rumah atau habitat alami bagi mereka untuk dapat melangsungkan kehidupan. Keberadaan hutan juga merupakan hal yang penting bagi umat manusia. Hutan merupakan paru-paru dunia yang menghasilkan oksigen untuk manusia bernafas. Dengan adanya kebakaran hutan tentu sadar atau tidak, cepat atau pun lambat risikonya akan memberikan dampak yang signifikan.

Berangkat dari pemikiran Beck, kasus kebakaran hutan ini merupakan dampak dari kemunculan industrialisasi yang dapat dijelaskan berkaitan dengan distribusi risiko dan kelas sosial. Keberadaan industrialisasi akan memberikan dampak pada pengalihan fungsi lahan yang awalnya merupakan hutan kemudian berganti menjadi perkebunan kelapa sawit. Hal itu dimaksud bertujuan untuk proses pembukaan lahan bagi perusahaan-perusahaan kelapa sawit. Proses pembakaran hutan merupakan tahapan atau langkah yang diambil dalam rangka meminimalkan modal. Meskipun demikian, proses pembukaan lahan dengan melakukan pembakaran hutan akan memberikan efek atau risiko yang berdampak tidak hanya kepada satu dua orang saja, melainkan kepada setiap orang. Dampak yang disebabkan dari risiko tersebut sangatlah bermacam-macam mulai dari gangguan pernapasan, kerusakan hutan, bahkan matinya hewan-hewan langka yang hidup di hutan tersebut.

Hal ini senada dengan pemikiran Beck yang mengatakan, keberadaan moderniasi terlahir dengannya risiko yang turut meyertai. Berkembangnya industri perkebunan kelapa sawit, berkembangnya perluasan lahan untuk dijadikan area perkebunan kelapa sawit yang mengakibatkan perusakan hutan. Perusakan hutan ini, jelas akan berdampak kepada flora dan fauna yang hidup di dalamnya. Proses atau tahap pemusnaha flora dan fauna dimulai dari tahap ini. Area yang awalnya merupakan hutan sebagai penghasil oksigen bagi makhluk hidup terutama manusia akan mengalami pengurangan akibat penurunan sumber penghasil oksigen.

Dengan adanya proses pembakaran hutan yang bertujuan untuk pembukaan lahan baru di Riau telah mengakibatkan banyaknya flora dan fauna mulai hilang. Akibat pembakaran hutan, terjadi produksi asap dengan jumlah yang banyak. Akibatnya langit di sekitar kebakaran hutan (Provinsi

Riau) diselimuti oleh kabut asap. Hingga pada akhirnya papan informasi indek kesehatan udara di Riau menunjukkan udara yang sangat berbahaya. Jarak pandang hanya dapat dilakukan dengan jarak 3 meter. Dampak kabut asap yang dihasilkan juga menyebar ke daerah atau provinsi lain di sekitar Riau. Hal itu turut memiliki efek dan risiko yang secara tak langsung terdistribusi. Risiko dari kabut asap tidak lagi hanya diterima oleh masyarakat di daerah Riau, melainkan juga berimbang kepada daerah yang secara nyata tidak berhubungan langsung dengan area pembakaran hutan.

Kondisi di atas dijelaskan Beck sebagai wujud proses pendistribusian risiko akibat keberadaan industrialisasi. Risiko itu tidak hanya diderita oleh masyarakat sekitar Riau tetapi juga kepada orang yang secara langsung tidak berhubungan dengan hal itu. Risiko tersebut, mau tidak mau, suka atau pun tidak suka akan memberikan dampak dan dikonsumsi oleh semua orang. Tidak terdapat pengecualiaan dalam kelas atau statifikasi sosial dalam paparan risiko ini semua elemen masyarakat menerima risiko yang dihasilkan. Hanya saja, pembagian kelas sosial dalam kasus ini dapat kita lihat pada kemampuan beberapa kelompok untuk meminimalisir dirinya dari risiko yang diperoleh.

Kabut asap yang menyeluruh, menyelimuti langit Riau dan daerah sekitarnya memberikan efek baik dalam jangka dekat atau pun jangka panjang. Berbagai penyakit muncul akibat dari risiko yang timbul akibat keberadaan kabut asap, diantaranya gangguan pernapasan, gangguan paru-paru, dan ISPA. Mereka yang merupakan kelompok kelas sosial menengah ke atas bisa meminimalisir risiko dengan kemampuan untuk membeli masker, bahkan melakukan kegiatan berupa perjalanan menggunakan mobil. Hal itu tentu memberikan sedikit meminimalisir risiko yang diperolehnya. Sementara mereka yang tidak memiliki mobil atau mereka yang merupakan kelompok kelas sosial menengah ke bawah tentu akan mengkonsumsi risiko lebih besar lagi. Masyarakat yang bekerja atau beraktifitas di dalam ruangan akan mendapatkan risiko lebih kecil dibandingkan dengan masyarakat yang bekerja di luar ruangan. Hal itu seperti contoh para petani, pekerja jalanan, dan pedagang harus menerima risiko mereka akan mendapatkan risiko yang lebih meskipun risiko tersebut bukan diproduksi oleh mereka. Relefansi tersebut seperti yang disampaikan oleh Beck dalam tesisnya yang menyatakan modernisasi berbeda dengan kemakmuran, diantaranya polutan/ polusi udara yang memberikan dampak kepada manusia, hewan, dan juga tumbuhan-tumbuhan.

Lebih lanjut, keberadaan kabut asap juga dapat dijadikan sebagai wadah kepentingan politik. Layaknya para tokoh akan memanfaatkan risiko yang terjadi sebagai media meningkatkan popularitas, tanpa memberikan penyelesaian yang jelas. Kondisi itu terbuti dimana saat kondisi kebakaran hutan yang terjadi beberapa waktu belakangan, elit politik berbondong-bondong mengunjungi tempat kejadian, namun tidak terjadi progress yang jelas dalam menyelesaian kasus tersebut. Tidak ada terjadi penindakan kongkrit dalam penanganan perusahaan-perusahaan yang menjadi dalang dari kebakaran hutan itu. Malah yang ada difusi serta komersialisasi risiko tiada putus sepenuhnya dari logika kapitalis.

Keberadaan kabut asap malah meningkatkan perkembangan kapitalis pada bentuk kapitalis baru. Perkembangan industri perkebunan kelapa sawit akan semakin berkembang. Risiko yang diproduksi akan tetap menjadi kondisi yang harus diterima oleh masyarakat sekitar. Kabut asap mengakibatkan munculnya produk kesehatan yang mengatas namakan alat pelindung kesehatan dari paparan kabut asap, seperti masker yang berstandar SNI, meningkatnya penjualan oksigen, dimana hal itu wujud semakin berkembangnya kapitalis dengan bentuk atau wajah baru.

Di lain sisi, keberadaan kabut asap muncul akibat dari kondisi politik dan ekonomi. Pembakaran hutan yang dilatarbelakangi pengembangan ekonomi bagi para kapitalis. Perkembangan itu melibatkan para elit politik untuk memperlancar aksi yang dilakukan. Langkah perancangan, pembuatan, pelaksanaan, dan evaluasi dari kebijakan oleh elit politik memberikan peluang bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk mengakali semua langkah yang dilakukannya. Dengan demikian, tidakan pembakaran hutan sebagai perilaku tidak bertanggungjawab menjadi langkah yang di tempuh.

Dari kenyataan tersebut maka jelas terlihat keberadaan industrialisasi melahirkan risiko-risiko yang mau tidak mau harus diterima oleh masyarakat tanpa dipengaruhi oleh keberadaan kelas sosial. Kelas sosial dalam hal ini hanya dapat menjelaskan pada perbedaan dalam kesadaran konsumsi dampak risiko yang berbeda. Perbedaan itu bukan berarti mampu menghindari mereka dari risiko, melainkan hanya sampai ke tahap proses meminimalisir dampak risiko. Tidak hanya masyarakat yang menjadi imbas dari risiko tersebut, tetapi juga mereka aktor pelaku dan dalang dari lahirnya kabut asap itu cepat atau lambat juga akan mendapatkan dampak dari risiko yang mereka ciptakan sendiri. Dalam

tatanan ini berlakuklah konsep Beck yang dikenal dengan *boomerang effect* risiko yang beberapa kelompok atau aktor pelaku hasilkan.

5. KESIMPULAN

Kabut asap yang terjadi di Provinsi Riau merupakan dampak dari kemunculan industrialisasi. Hal itu mengakibatkan semakin berkembangnya kemunculan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang industri perkebunan kelapa sawit. Pengalihan fungsi hutan sebagai habitat alami flora fauna dan sebagai sumber pemasok oksigen menjadi lahan-lahan perkebunan kelapa sawit menyumbangkan risiko. Risiko tersebut didistribusikan oleh beberapa aktor yang terlihat dalam hal itu. Walau pun demikian, risiko yang didistribusikan memberikan dampak kepada manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan.

Lebih jauh lagi, proses pembakaran hutan yang terjadi di Riau mengakibatkan mereka musnah. Bahkan dengan pembakaran hutan, telah menghasilkan asap yang berdampak kepada masyarakat sekitar. Risiko yang dihasilkan dari kabut asap itu, mau tidak mau, suka atau pun tidak suka harus diterima oleh masyarakat. Keberadaan kabut asap ternyata juga tidak terbatas dialami oleh masyarakat yang tinggal di Riau saja, melainkan juga berimbas kepada masyarakat yang tinggal dari daerah lain dimana daerah itu menerima penyebaran asap dari daerah Provinsi Riau.

Distribusi risiko dalam pemikiran Beck tidak hanya dialami oleh sekelompok masyarakat, melainkan risikonya dikonsumsi oleh semua orang. Keberadaan kelas tidak berpengaruh dalam hal penyebaran konsumsi risiko ini, hanya saja terjadi perbedaan dalam mengkonsumsinya. Hal itu terlihat dari kemampuan mereka yang berasal dari kelas sosial menengah ke atas lebih mampu meminimalisir paparan risiko dibandingkan mereka yang berada pada kelas sosial menengah ke bawah. Kemampuan itu disebabkan dari kapasitas mereka untuk memiliki fasilitas yang sedikit bisa membantu mengurangi efek dari risiko yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Beck, U. (1992). *Risk Society: Towards a New Modernity*. Sage Publications.
- Beck, U. (1995). *Ecological Politics in an Age of Risk*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bisyafar, N. K. (2023). Ancaman Industrialisasi Dalam Masyarakat Risiko. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 2(2), 29–47.
- BPS. (2018). *Statistik Kelapa Sawit di Indonesia 2017*.
- Creswell, J. W. (2007). Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches. In *Sage Publications* (Second Edi). University of Nebraska.
- Hanifah, A. A., Nugroho, A. A., & Tunggadewi, A. V. (2023). Masyarakat Era Kontemporer Dalam Menghadapi Risiko Plastik. *Student Scientific Creativity Journal (SSCJ)*, 1(3), 131–156.
- Kemenperin. (2019). *Prospek dan Permasalahan Industri Sawit*.
- Khairunnisa, R., Ekha Putera, R., & Yoserizal, Y. (2021). Koordinasi Pemerintah Kabupaten Kampar Dalam Penanggulangan Bencana Kabut Asap. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 4(1), 140–147. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v4i1.1618>
- Kusvianti, P., Putri, A., Ashari, R., & Izzah, A. N. (2023). Pandangan Ulrich Beck Tentang Risiko dan Ketidakpastian yang Dialami. *Jurnal Ilmiah Ecosystem Volume*, 23(1), 149–163. <https://doi.org/10.35965/eco.v23i1.2495>
- Marianta, Y. I. W. (2011). Akar Krisis Lingkungan Hidup. *Studia Philosophica et Theologica*, 11(2), 231–253. <http://ejournal.stftws.ac.id/index.php/spet/article/view/72>
- Meiwanda, G. (2016). Kapabilitas Pemerintah Daerah Provinsi Riau: Hambatan dan Tantangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 19(3), 251. <https://doi.org/10.22146/jsp.15686>
- Meiwanda, G., & Nizmi, Y. (2021). Kompleksitas penanggulangan kebakaran hutan dan kabut asap di Indonesia. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 3(1), 33–46. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/JSIP/article/view/5353>
- Nizmi, Y. E. (2021). Kabut Asap, Ancaman Terhadap Human Security dan ASEAN Way. *JMM: Jurnal Masyarakat Maritim*, 05(1), 36–45.

- <https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/JEQ/article/view/820/532>
- Pasai, M. (2020). Dampak Kebakaran Hutan dan Penegakan Hukum. *Jurnal Pahlawan*, 3(1), 36–46.
<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jp/article/view/609/515>
- Ritzer, G. (2003). *Teori Sosiologi Post-Modern*. Yogayakarta: Kreasi Wacana.
- Wahyuni, D. (2021). Bencana Kabut Asap Sebagai Dampak Budaya Konsumsi Dalam Cerpen “Yang Datang Dari Negeri Asap.” *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya*, 11(1), 79–86.
<https://doi.org/10.17510/paradigma.v11i1.371>
- Zahro, H., Fitria, S. D. J., & Palupi, Y. A. (2023). *Pandemi Covid-19 Dalam Risiko Masyarakat Kontemporer*. 3(2).